





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : STAF AHLI

SUB UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPRAMNARYO** 

2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

3. NHK : 269800

## II. DATA HARTA

## A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.625.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/135 m2 di KARANGANYAR,
  HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
- 2. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/120 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
- 3. Tanah Seluas 5514 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- Tanah Seluas 110 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
  50.000.000
- 5. Tanah Seluas 148 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
- 6. Tanah Seluas 152 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- 7. Tanah Seluas 200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- 8. Tanah Seluas 186 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/114 m2 di KOTA BENGKULU
  HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah Seluas 270 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
  270.000.000

# B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

82.000.000

1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.





## 7.000.000

2. MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2013, HASIL SENDIRI RP

75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 17.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp
Sub Total	Rp. 2.732.000.000
III. HUTANG	Rp. 286.0 <b>0</b> 0.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 2.446.000.000

#### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 April 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

